



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
JL. TANJUNG API NO. 7 PALU 94112 TELP. (0451) 421954**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Palu, 12 Juni 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH.



DISARFAN, M.Si
Penyaha Utama Madya
Nip. 19710909 199012 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTARGAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.....	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	22
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	22
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	24
3.4 Rencana Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	41
BAB V PENUTUP.....	66
3.5 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.6 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.7 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	24
3.8 Rencana Program dan Kegiatan	26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	41
BAB V PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	29
Tabel 2.2	Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah	18
Tabel 3.1	Telaah Tujuan/Sasaran K/L	21
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi KDH/WKDH	24
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	25
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	29
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah secara terinci dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penekanannya adalah pada sesuatu yang akan diraih atau diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah, disusun kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional serta bagaimana pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan PD sesuai dengan Tupoksinya.

Selanjutnya Renja Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka sepenuhnya program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada satu tahun kedepan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan daerah jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024, guna Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang Akuntabel;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan rancangan awal RKPD tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Rencana Strategis yang ditetapkan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul, dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024.

Terkait dengan fungsi pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 boleh

dibilang memuaskan. Hal itu bisa dilihat dari rata-rata kumulatif pencapaian pada tahun 2023 rata-rata program dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil memuaskan, dengan capaian berkisar 90 sampai dengan 100 %.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sementara itu indikator kinerja berupa benefit dan impact tidak digunakan karena pengukurannya memerlukan penelitian lebih mendalam. Untuk pengukuran kinerja tingkat sasaran dituangkan dalam formulir pencapaian kinerja kegiatan (PKK), sedangkan untuk pengukuran kinerja sasaran dimuat dalam formulir pengukuran pencapaian sasaran (PPS). Capaian Indikator Program Tahun 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 telah melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan yang didukung oleh APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 64,718,823,222,- dengan rincian:

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai : Rp. 6.674,419,628,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 10,176,322,346,-
- Belanja Hibah : Rp. 46,010,954,000,-

Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 1,767,476,098,-

Dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 62,884,411,556,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,16 %.

Realisasi dari anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 11,858,681,872,- yang meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 567,107,100,- anggaran yang terserap Rp. 562,584,198,- atau terealisasi sebesar 99,20 %. Capaian kinerja yang dihasilkan :

- Dokumen Perencanaan;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Administrasi Keuangan dan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 7.922,511,178,- dengan anggaran yang terserap Rp. 6.170,147,111,- atau terealisasi sebesar 77,88 %. Capaian kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Realisasi Anggaran;
 - Persentase Realisasi Anggaran;
 - Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah, alokasi Rp. 3,369,063,594,- dengan anggaran yang terserap Rp. 2,118,958,608,- atau terealisasi sebesar 62,89 %. Capaian kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian;
 - Laporan penyediaan barang dan jasa;
2. Program Pembinaan Wawasan Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp. 3,297,696,125,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 3,273,589,335,- atau terealisasi sebesar 99,26 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan;
 - Pembinaan/Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
 - Pembinaan dan Penguatan FPK.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan alokasi anggaran Rp. 43,413,760,550,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 43,412,430,945,- atau terealisasi sebesar 99,99 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik;
 - Pembinaan/Sosialisasi Pendidikan, Etika dan Budaya Politik;
 - Laporan Batuan Hibah Keuangan Partai Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan alokasi anggaran Rp. 4,456,981,700,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 4,456,232,186,- atau terealisasi sebesar 99,98 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :

- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.LSM;
 - Jumlah Ormas/LSM terdaftar;
 - Pembinaan/Sosialisasi Ormas/LSM;
 - Laporan Bantuan Hibah Ormas/LSM.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan alokasi anggaran Rp. 364,643,625,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 363,756,895,- atau terealisasi sebesar 99,75 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan alokasi anggaran Rp. 1,327,059,350,- dengangan anggaran yang terserap Rp. 1,317,772,278,- atau terealisasi sebesar 99,30 %. Capaian Kinerja yang dihasilkan :
- Dokumen Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
 - Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - Rapat Koordinasi Penanganan Konflik.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, maka realisasi capaian kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)		Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)	
										K	Rp	K	Rp
1					2	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						3		4		5		6	
8					Unsur Pemerintah Umum								
8	0				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH				64,718,823,222		62,884,411,556		167,037
8	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	Indeks	11,858,681,872		8,851,689,917		909
8	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	567,107,100		562,584,198		148
8	0	0	1.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	33,802,050	12	33,465,550	100	64
8	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	Laporan	44,878,200	4	43,918,200	100	30

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
8	0	0	1.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	488,426,850	4	485,200,448	100	41
8	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	Persentase	7,808,809,378		6,059,390,425		
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang / Bulan	6,497,870,778	12	4,760,679,545	40	42
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Dokumen	1,232,475,000	4	1,221,858,000	100	36
8	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	Laporan	63,860,000	3	62,722,480	100	21

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)			
					Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
8	0	0	1.0	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Dokumen	3,926,400	1	3,737,200	50	20
8	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	7,190,800	3	7,096,000	50	25
8	0	0	1.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	3,486,400	1	3,297,200	60	14

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
8	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	113,701,800	110,756,686	83		
8	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Laporan	6,986,400	2	4,524,700	60	9
8	0	0	1.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	50,700,700	1	50,406,886	60	58
8	0	0	1.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	56,014,700	4	55,825,100	120	16
8	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks	248,393,138	240,657,000	80		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
8	0	0	1.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	248,393,138	1	240,657,000	100	80
8	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan	439,245,196		439,056,291		293
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	7,492,326	1	7,492,325	40	31
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	14,999,820	1	14,999,820	40	118
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	69,963,050	1	69,924,146	40	41
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	Dokumen	29,400,000	4	29,400,000	100	30

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
						Undangan yang Disediakan					
8	0	0	1.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan 50,000,000	4 49,850,000	10 0	39
8	0	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan 267,390,000	1 267,390,000	40	33
8	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan 1,767,476,098	529,360,000		91
8	0	0	1.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit 1,230,960,000	4 1,208,940,000	67	83
8	0	0	1.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	Unit	- -	33	35

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
						Lapangan yang Disediakan							
8	0	0	1.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	51,899,400	1	51,480,000	50	15
8	0	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	484,616,698	40	477,880,000	32	76
8	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Laporan	254,643,776		252,839,593		87
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	124,589,376	4	123,086,393	10	43
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	-	0	-	20	9
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Laporan	130,054,400	3	129,753,200	80	35

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
						Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
8	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Laporan	659,305,386	657,045,724	127		
8	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	568,350,000	33	566,565,724	41	70
8	0	0	1.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	36,340,000	54	36,110,000	38	36
8	0	0	1.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	54,615,386	1	54,370,000	40	11

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
8	0	0			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	Persentase	3,297,696,125	3,273,589,335		1,175	
8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	Dokumen	3,297,696,125	3,273,589,335		1,175	
8	0	0	1.0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	191,290,625	4	181,432,713	100	516
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Orang	Orang	2,613,446,800	278	2,601,949,105	102	411

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
					Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	209,094,775	150	206,463,638	36	55
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Laporan	Laporan	242,257,600	4	242,137,554	40	93

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
					Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
8	01	02	1.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	41,606,325	50	41,606,325	33	100
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks	Persentase	Persentase	43,413,760,550		43,412,430,945		142,282

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
					POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Demokrasi Indonesia (IDI)							
8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Dokumen	Dokumen	43,413,760,550	43,412,430,945		142,282	
8	0	0	1.0	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Dokumen	Dokumen	42,121,588,750	3	42,121,488,440	80	142086

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
					Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
8	013	013	1.013	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	Orang	275,064,200	400	274,995,000	263	49

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
						Situasi Politik di Daerah							
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	401,651,000	300	401,438,200	78	57

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)	
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	615,456,600	4	614,509,305	40	90
8	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase	Persentase	4,456,981,700		4,456,232,186		21,862

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	Dokumen	4,456,981,700	4,456,232,186		21,862	
8	0	0	1.0	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	4,120,000,000	3	4,120,000,000	80	21481
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Orang	Orang	97,898,450	135	97,346,035	70	212

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
						dan Ormas Asing di Daerah							
8	014	104	04	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	63,579,600	45	63,568,030	83	46
8	014	104	15	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	175,503,650	4	175,318,121	40	123

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
8	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase	Persentase	364,643,625	363,756,895		200	
8	0	0	1.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	Dokumen	364,643,625	363,756,895		200	
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	153,366,875	75	153,106,058	65	67

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)			
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	66,912,775	140	66,853,828	67	45
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Laporan	Laporan	144,363,975	4	143,797,009	40	88

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
						Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	Persentase	Persentase	1,327,059,350	1,317,772,278		608	
8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	Dokumen	Dokumen	1,327,059,350	1,317,772,278		608	
8	0	0	1.0	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	Dokumen	Dokumen	88,030,850	4	87,444,360	40	129

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
					Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun							
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Orang	Orang	87,672,500	110	84,081,946	38	75

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				
						Penanganan Konflik di Daerah							
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	423,025,100	335	420,590,104	71	116

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renja PD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	280,632,850	4	280,006,808	40	92
8	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen	447,698,050	2	445,649,060	30	196

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Keberhasilan program ini dihasilkan dari elemen masyarakat yang memiliki kepedulian dan konsentrasi pada pbumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Strategi kerjasama ini menghasilkan pelaksanaan kegiatan lebih 32ndica dan cakupan yang lebih luas, walaupun dengan minimnya ketersediaan anggaran.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik untuk membangun Pendidikan Politik, Penatausahaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat, Kegiatan FGD Penguatan Budaya Dan Etika Politik Masyarakat.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dikemas sosialisasi yang melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif. Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup 32 ndicat dengan saling toleransi antar maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas. Ormas yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai indicator maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai ketahanan ekonomi di daerah dan mengantisipasi terjadinya gejolak 32 ndica. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk unggulan

daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemecahan masalah dengan melalui mufakat 33 ndicat, yang saling mempercayai dan saling terbuka untuk menyelesaikan konflik 33ndica yang terjadi. Selain dengan keterlibatan masyarakat, penguatan Tim Terpadu dalam penanganan konflik 33 ndica dan kerjasama melalui Tim Kewaspadaan Dini serta koordinasi antara instansi terkait melalui Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah perlu dikuatkan lagi untuk mencegah dan menangani konflik 33ndica yang terjadi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat madani di bidang pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Sulawesi Tengah, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Sulawesi Tengah.
2. Terselenggaranya Pengembangan Ideologi Bangsa Dan Wawasan Kebangsaan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Sulawesi Tengah dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara demi NKRI.
3. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung Sulawesib. Hal ini mengandung pengertian bahwa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai indikator teknis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Tabel 2.2.
Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	NAMA IKU DAN IKK	TARGET IKU DAN IKK	SATUAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2023	REALISASI RENSTRA 2023	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	20% (770 Orang)	51,11 % (1.968 Orang)	Target 3.850 Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Kegiatan Badan Kesbangpol
2	Meningkatnya Pendidikan, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	77,10	-	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Belum di Keluarkan dari BPS

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan kondisi indikator politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk melakukan upaya deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mengganggu kelancaran Pemerintahan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Sulawesi Tengah dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- a. Kesenjangan sosial ekonomi.
- b. Belum maksimalnya pendidikan politik dimasyarakat
- c. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal.
- d. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik 35ndica.
- e. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- f. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
- g. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
- h. Masih adanya gangguan kerawanan oleh pelaku aksi teror.
- i. Masih sering terjadi Konflik batas wilayah dan bentrokan antarwarga, antarpemuda dan antardesa.

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah tersusun 6 (enam) program yang terjabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan , sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan:
 - 9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan kegiatan:
 - 10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan:
 - 11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan:
 - 12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan:
 - 13. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebijakan					
				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	17.742.830.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	17.742.830.000
8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sulawesi Tengah	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40	376.990.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sulawesi Tengah	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40	376.990.000
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	40	1.627.260.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	40	1.627.260.000
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	100	510.880.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	100	510.880.000
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40	225.070.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sulawesi Tengah	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40	225.070.000
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sulawesi Tengah	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	40	365.340.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sulawesi Tengah	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	40	356.810.000
TOTAL								20.460.360.000					20.460.360.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Di samping memastikan sinkronisasi dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Presiden. Visi Misi Presiden dijabarkan oleh Kementerian/Lembaga yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, untuk itu sangat perlu memperhatikan Permendagri No. 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024.

Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tujuan strategis, yaitu Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan kebutuhan Kelembagaan.

Tabel 3.1
Telaah Tujuan/Sasaran K/L

Tujuan : “Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa”				
No	Sasaran K/L	Tupoksi PD	Faktor	
			Pengdorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia	1. Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Adanya UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan Kegiatan Perpolitikan
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2. Adanya PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD	2. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap ancaman disintegrasi Bangsa
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3. Adanya Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg Bid. Kesatuan Bangsa dan Politik	3. Masih adanya isu SARA 38ndi berpotensi Konflik
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, 38ndica dan budaya	4. Adanya Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang Nilai-Nilai sejarah Kebangsaan
		5. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	5. Adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019	5. Belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan Ormas dan LSM

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan kedalam Sembilan (9) Misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Dari misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah secara langsung dan tidak langsung mendukung semua misi yang tercantum, terutama pada Misi Kedua : **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**. Sebagai bahan Telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan identifikasi beberapa

permasalahan, beserta 40 ndica penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi KDH/WKDH

Visi : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"					
No	Misi/ KDH/WKDH	Tupoksi PD	Faktor		
			Pendorong		Penghambat
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)
	"Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM"	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Adanya UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya)	1. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap ancaman disintegrasi Bangsa
		2. Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.	Adanya PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD	2. Masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan Kegiatan Perpolitikan
		3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	3.	Adanya Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg Bid. Kesatuan Bangsa dan Politik	3. Belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan Ormas dan LSM
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, 40ndica dan budaya	4.	Adanya Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang Nilai-Nilai sejarah Kebangsaan
		5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.	Adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019	5. Masih adanya isu SARA yg berpotensi Konflik

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dicapai dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan isu – isu strategis yang harus ditindak lanjuti sebagai upaya untuk memberikan dukungan dan 40 ndicator 4040 solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi program merupakan 40ndicator40 kebijakan yang terdiri dari satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan : **“Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)”**).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan 41 ndic pada penyusunan Program dan Kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah beserta 41 ndicator kinerjanya dapat dijelaskan dalam 41 ndic 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)		Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan	Persentase	20	40	60	80	100
	- Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase	20	40	60	80	100

		Kebangsaan						
	- Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	76,50	76,80	77,10	77,15	77,20

3.4 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun terdapat 6 (enam) Program, sebagaimana berikut :

3.4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kegiatan dan output atau indicator Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan PertanggungSulawesian Keuangan.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

3.4.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, serta dengan kegiatan dan output atau indicator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3.4.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dengan kegiatan dan output atau indicator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik.

3.4.4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kegiatan dan output atau indicator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3.4.5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan dan output atau 45ndicator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

3.4.6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

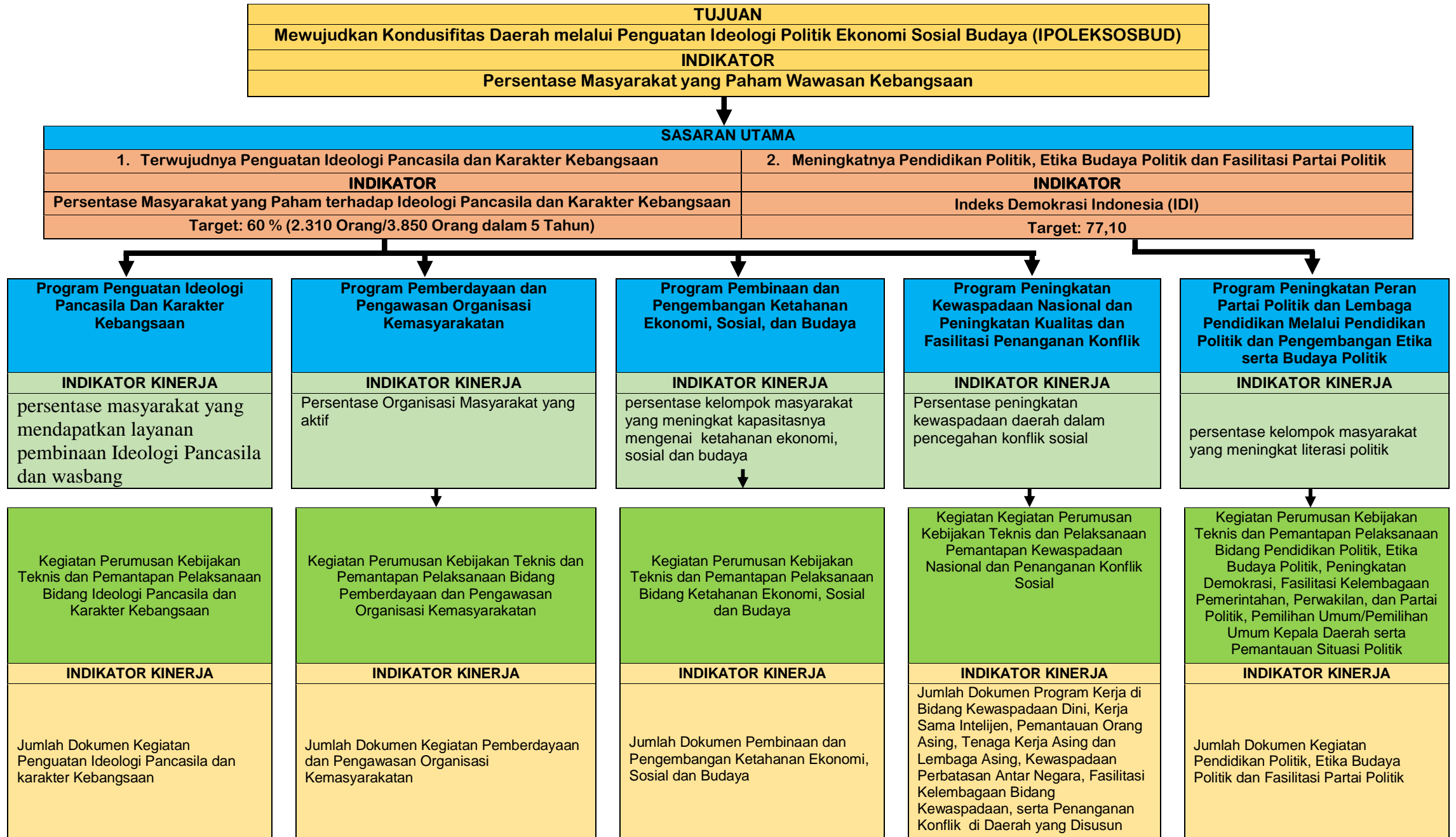
Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah, serta dengan kegiatan dan output atau 45ndicator kegiatan sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpeng tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disajikan pada gambar dibawah ini:

POHON KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 3.1

Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 60 % (2.310 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 60 % (750 orang/1.250 orang dalam 5 Tahun)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 5 Dokumen

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Pelajar yang terseleksi dan diberikan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka
Target : 56 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
1.jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi penguatan dan pemantapan ideologi pancasila 2.Jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa
Target : 120 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Target : 150 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi
Target : 4 Kab/Kota

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
INDIKATOR KINERJA
Jumlah keluarga yang diberikan penguatan pentingnya kesadaran ideologi pancasila
Target : 10 Kelurahan

SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
1. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Target : 60 % (2.310 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang disetujui pendaftarannya pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Target : 100 %

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Target : 6 Dokumen

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA
Jumlah ormas penerima dana hibah	Jumlah anggota ormas yang mengikuti sosialisasi	Jumlah laporan dari hasil pengawasan Organisasi/Kelompok masyarakat	Persentase usulan dana hibah ormas yang di verifikasi	Jumlah rekomendasi terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas	Jumlah ormas yang terevaluasi
Target : 4 Ormas	Target : 60 Orang	Target : 1 Laporan	Target : 100 % Verifikasi	Target : 1 Rekomendasi	Target :

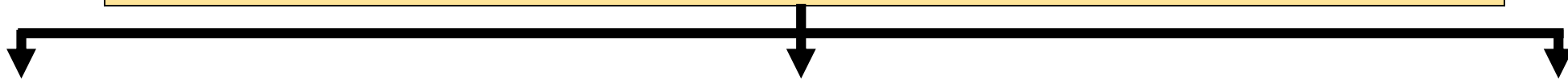
SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target : 60 % (2.310 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)



Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
INDIKATOR KINERJA
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Target : 60 Persen (360 Orang/600 Orang dalam 5 Tahun)



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Target : 3 Dokumen



Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif
Target : 60 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Target : 60 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah laporan pelaksanaan
Target : 4 Laporan

SASARAN UTAMA
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
1. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Target : 60 % (2.310 Orang/3.850 Orang dalam 5 Tahun)

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
INDIKATOR KINERJA
Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dalam pencegahan konflik sosial
Target : 60 Persen (840 Orang/1.400 Orang dalam 5 Tahun)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
INDIKATOR KINERJA
Persentase peningkatan perangkat aparatur dan tokoh masyarakat yang terbina kewaspadaan daerahnya
Target : 5 Dokumen

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah dokumen RAD-PKS 2. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan RAD PKS 3. Jumlah laporan hasil rapat TIMDU RAD-PE 4. Jumlah laporan hasil rapat TIMDU pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme
Target : 2 Rekomendasi

Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial 2. Jumlah rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah
Target : 2 Rekomendasi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah aparatur dan aparat keamanan serta para tokoh yang mengikuti rapat sosialisasi peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan 2. Jumlah peserta sosialisasi
Target : 150 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen data perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah
Target : 13 Dokumen

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
INDIKATOR KINERJA
Jumlah laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi
Target : 4 Laporan

SASARAN UTAMA

Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik
INDIKATOR KINERJA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Target : 60 % (480 Orang/800 Orang dalam 5 Tahun)



Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
INDIKATOR KINERJA
persentase kelompok masyarakat yang meningkat literasi politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik
Target: 4 Dokumen



Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
1.Jumlah lembaga penerima dana hibah penyelenggaraan pemilukada 2.Jumlah partai politik penerima bantuan Keuangan
Target : 4 Lembaga dan 11 Parpol

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
1.Jumlah peserta sosialisasi Peraturan PerUndang-Undagan Bidang politik bagi Partai Politik 2. Jumlah Peserta Organiasi/Kelompok Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pendidikan politik
Target : 220 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Peserta sosialisasi Pemanapan Etika budaya politik bagi Partai Politik dan Kelompok Masyarakat
Target : 180 Orang

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi
Target : 13 Kab/Kota

Dukungan Sekretariat dalam “Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD)”

SASARAN 1	SASARAN 2	SASARAN 3
Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Perencanaan	Meningkatnya Tata Usaha OPD Kesbang yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola OPD yang Berkualitas
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Meningkatnya Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat yang Berkualitas	Meningkatnya Penyelenggaraan Keuangan dan Pelayanan Administratif Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administratif Kepegawaian yang berkualitas

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : 75	Target : 97,50 %	Target : 85
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Target : 3 Dokumen	Target : 12 Bulan	Target : 1 Paket
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Target : 1 Laporan	Target : 1 Dokumen	Target : 1 Orang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target : 1 Laporan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Target : 1 Dokumen

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
INDIKATOR
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Target : 4 Laporan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Target : 1 Laporan

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target : 1 Laporan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa
Target : 6 Dokumen

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target : - Laporan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Target : - Laporan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
INDIKATOR
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Target : - Paket

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target : 1 Laporan

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
INDIKATOR
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Target : 1 Laporan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
INDIKATOR
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Target : 1 Laporan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
INDIKATOR
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Target : 1 Paket
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
INDIKATOR
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Target : 60 Unit
Sub Kegiatan :Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Yang Disediakan
Target : 2 Unit

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target : Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target : 1 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target : 1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target : 1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target : 3 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
INDIKATOR

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Target : 33 Unit

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

INDIKATOR

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Target : 40 Unit

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kelura han		Pelayana n Publik		Kinerja Perangk at Daerah			Sulawes i Tengah	
8	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penanggul angan Korban Bencana melalui penyediaa n APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenang an provinsi	Dokume n Perenca naan, Penggan garan dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	1 Laporan	550.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah
8	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									11.364.830.000	11.564,830.000	
8	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Palu, Palu Timur,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		Penunjang Program prioritas	Dokume n Asminist rasi	14 Orang/ Bulan	8.369.500.000	Badan Kesatua n Bangsa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Lolu Selatan	(PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Keuanga n Perangkat Daerah			dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
8	1	1	01.02	2				Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Program prioritas	Dokume n Asminist rasi Keuanga n Perangkat Daerah	12 Dokum en	2.780.330.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	1	01.02	5				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Program prioritas	Dokume n Asminist rasi Keuanga n Perangkat Daerah	1 Laporan	315.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	1	01.03												280.000.000	380.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
	Perangkat Daerah																		
8	1	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	30.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	1 Laporan	80.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	1 Laporan	200.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	1 Laporan	100.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						515.000.000							515.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8	1	1	01.05	2				1 Paket	300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Kepegaw aian Perangk at Daerah	1 Paket	300.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.05	9				2 Orang	215.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Kepegaw aian Perangk at Daerah	2 Orang	215.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06						745.000.000							795.000.000	
8	1	1	01.06	2				1 Paket	45.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Umum Perangk at Daerah	1 Paket	95.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	5				1 Paket	100.000.000	Kota Palu, Palu Timur,	PENDAP ATAN ASLI		Penunjang Program prioritas	Laporan Administrasi Umum	1 Paket	100.000.000	Badan Kesatua n Bangsa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targe t RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
		yang Disediakan						Lolu Selatan	DAERAH (PAD)			Perangk at Daerah			dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
8	1	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangk at Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangk at Daerah	1 Laporan	50.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Administ rasi Umum Perangk at Daerah	1 Laporan	500.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targe t RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
8	1	1	01.08				475.000.000							675.000.000				
8	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Laporan	250.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	75.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	1 Laporan	75.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Laporan Penyediaan Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	1 Laporan	350.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.650.000.000						1.650.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
8	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Unit	1.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targe t RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8	1	2					376.990.000							876.990.000			
8	1	2	01.01				376.990.000							376.990.000			
8	1	2	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			1 Dokumen	3.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	1 Dokumen	3.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	2	01.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter			1 Dokumen	6.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	1 Dokumen	6.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun														Sulawes i Tengah		
8	1	2	01.01	3							PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), V		Penunjang Program prioritas	Generasi Muda		635.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah	
8	1	2	01.01	4					150 Orang	145.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	150 Orang	145.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawes i Tengah
8	1	2	01.01	5					4 Laporan	86.990.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Generasi Muda	4 Laporan	86.990.000	Badan Kesatua n Bangsa dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						atan, Semua Kelura han							Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	3												1.627.260 .000	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												1.627.260 .000	
8	1	3	01.01											1.627.260 .000	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
8	1	3	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	3	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
8	1	3	01.01	3			40 Orang	1.136.760.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penunjang Program prioritas	Masyara kat	40 Orang	1.136.760.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	3	01.01	4			120 Orang	255.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat	120 Orang	255.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Kelurahan								Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	3	01.01	5			4 Laporan	225.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Masyarakat	4 Laporan	225.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
8	1	4					510.880.000							510.880.000				
8	1	4	01.01				510.880.000							510.880.000				
8	1	4	01.01	1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	5.500.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara kat (Ormas)	1 Dokume n	5.500.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	4	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,				1 Dokumen	5.000.000	Kota Palu, Palu Timur,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD),	Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisa si Masyara	1 Dokume n	5.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun							Lolu Selatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			kat (Ormas)			Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	4	01.01	3			60 Orang	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisasi Masyarakat (Ormas)	60 Orang	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	4	01.01	4			60 Orang	175.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisasi Masyarakat (Ormas)	60 Orang	175.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
8	1	4	01.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Organisasi Masyarakat (Ormas)	4 Laporan	175.380.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											225.070.000	
8	1	5	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											225.070.000	
8	1	5	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang	Jumlah Dokumen Program Kerja				Kota Palu, Palu	PENDAP ATAN ASLI		Penunjang Program prioritas	MAsyara kat	1 Dokumen	2.892.800	Badan Kesatuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Timur, Lolu Selatan	DAERAH (PAD)						Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8	1	5	01.01	2			1 Dokumen	3.038.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	MAsyara kat	1 Dokume n	3.038.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	5	01.01	3			60 Orang	80.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	MAsyara kat	60 Orang	80.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targe t RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														Sulawes i Tengah
8	1	5	01.01	4				60 Orang	80.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	MAsyarakat	60 Orang	80.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	5	01.01	5				4 Laporan	59.139.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	MAsyarakat	4 Laporan	59.139.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
8	1	6	01.01	2			4 Dokumen	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah	4 Dokumen	25.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	6	01.01	3			130 Orang	45.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah	130 Orang	45.000.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKP D Tahu n 2021	Prakir aan Capai an Targe t RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														i Tengah
8	1	6	01.01	4					130.000.000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah		130.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8	1	6	01.01	5				4 Laporan	130.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint	4 Laporan	130.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode RPJ MD	Reali sasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capaian Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						atan, Semua Kelura han			ah Daerah			Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah					
8	1	6	01.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	32.840.000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penunjang Program prioritas	Masyara kat dan Unsur Pemerint ah Daerah	4 Dokumen	382.840.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
TOTAL																		20.460.370.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan program dan kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dan Institusi yang menangani tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah berpedoman terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini, demi terciptanya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya mempertimbangkan efisiensi secara rasional dan proporsional. Oleh karena itu perlu disusun prioritas program dan kegiatan sesuai aspek-aspek yang dinilai strategis.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait dengan memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.